

INTISARI

Standar pelayanan publik di Indonesia masih terbilang buruk, termasuk di Mahkamah Konstitusi. Pada Tahun 2013-2016, terjadi penurunan indeks pelayanan penanganan perkara. Pelayanan penanganan perkara sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang diorganisasikan ke dalam struktur organisasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi struktur organisasi MK tahun 2016 dalam melaksanakan strategi dan menentukan apa yang perlu diubah. Penelitian ini membatasi struktur organisasi yang mendukung pelayanan penanganan perkara pengujian undang-undang dengan metode evaluasi yang membandingkan struktur organisasi yang terjadi pada tahun 2016 dengan yang seharusnya terjadi melalui tahapan pengumpulan data; reduksi data; penyajian data dalam bentuk kata, gambar, tabel; dan menarik kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung serta dokumen yang dikeluarkan MK ataupun pihak eksternal. Lokasi penelitian adalah Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi MK tahun 2016 yang diukur melalui dimensi spesialisasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, dan ukuran satuan kerja belum efektif dan efisien mendukung pelaksanaan strategi. Penelitian ini menyarankan MK untuk memperbaiki pembagian pekerjaan Panitera Muda (PM) dan Panitera Pengganti (PP) Tingkat I dan II; menata ulang pengelompokan pekerjaan PM, PP, Pranata Peradilan, Perisalah, Pranata Komputer; memperbaiki pembuatan keputusan PM dan PP Tingkat I dan II, menyesuaikan jumlah pegawai PM, PP Tingkat I dan II, Juru Panggil.

Kata Kunci : Strategi, Struktur Organisasi, Spesialisasi Kegiatan, Sentralisasi dan Desentralisasi Pembuatan Keputusan, dan Ukuran Satuan Kerja.

ABSTRACT

Public service standard in Indonesia is still fairly poor, including in Constitutional Court. In the year 2013-2016, there is a decrease in the case handling service index. The case handling service highly depends on the human resources organized into the organizational structure.

The objective of this study is to evaluate the effectiveness and the efficiency of the Constitutional Court organizational structure in the year 2016 in implementing strategies and determining what needs to be changed. This study limits the organizational structure supporting the case handling service of the law review with the evaluation method comparing the organizational structure in the year 2016 with what is supposed to happen through the stages of data collection; data reduction; data presentation in the form of words, pictures, tables; and conclusions. The data collection is done through direct interview and observation as well as the documents issued by Constitutional Court or external parties. This study takes place in the Constitutional Court. The result of this study shows that the Constitutional Court organizational structure in the year 2016 measured through the dimension of activity specialization, centralization, and decentralization of the decision making, and the personnel size has not yet been effective in supporting the strategy implementation. This study suggests that Constitutional Court should fix the work division of the Young Registrar and the Substitute Registrar in the Level I and II; rearrange work grouping of the Young Registrar, the Substitute Registrar, the Judicial Institution, the Minutes, and the Computer Institution; fix the decision making of the Young Registrar and the Substitute Registrar in the Level I and II, adjust the number of the Young Registrar and the Substitute Registrar in the Level I and II, and the Caller.

Keywords: Strategy, Organizational Structure, Activity Specialization, Centralization and Decentralization of Decision Making, and Personnel Size.